Journal of Science and Social Research ISSN 2615 – 4307 (Print)
Oct 2026, IX (5): 8649 – 8653 ISSN 2615 – 3262 (Online)
Available online at http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR

PERAN STAKEHOLDER DALAM MENGATASI SAMPAH KIRIMAN DI IRIGASI CIKAMPEK *THE ROLE OF STAKEHOLDERS IN ADDRESSING TRASH CARRIED BY WATER IN THE* CIKAMPEK *IRRIGATION SYSTEM*

Alida Putri Nurhaliza[1], Evi Priyanti[2], Kariena Febriantin[3]
Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang
e-mail: 2210631180005@student.unsika.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze the role of the village government in addressing the accumulation of imported trash that is blocking the Karanggelam irrigation culvert in Dawuan Tengah Village, Cikampek Subdistrict, Karawang Regency. This study employs a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation from the Dawuan Tengah Village Government, the Department of Environment and Forestry (DLHK), the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR), neighborhood association (RT) leaders, and community members. Data analysis utilized the Miles and Huberman interactive model. The theoretical framework employed was the theory of government roles according to Sondang P. Siagian (2016), encompassing regulation, facilitation, dynamization, coordination, and supervision. The results of the study indicate that all five aspects of the village government's role have been implemented, though not yet optimally. In terms of regulation, public awareness campaigns and appeals have been conducted, but no specific regulations regarding imported waste are yet in place. In terms of facilitation, waste management infrastructure has been provided, but facilities and heavy equipment remain limited. In terms of community engagement, the public has been mobilized through community service and collective efforts, although cross-regional participation has not yet been optimal. Coordination and oversight have also been implemented, but they have not yet been fully integrated from upstream to downstream. This study concludes that waste management still tends to be reactive, occurring only after waste has accumulated. Therefore, strengthening regulations, infrastructure, community participation, cross-regional coordination, and continuous oversight is necessary to achieve more effective waste management.*

Keyword: *Village Government; Incoming Waste; Karanggelam Irrigation; Waste Management; Dawuan Tengah.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa dalam mengatasi tumpukan sampah kiriman yang menghalangi gorong-gorong Irigasi Karanggelam di Desa Dawuan Tengah, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan Pemerintah Desa Dawuan Tengah, DLHK, PUPR, Ketua RT, dan masyarakat. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Teori yang digunakan adalah teori peran pemerintah menurut Sondang P. Siagian (2016), meliputi regulasi, fasilitasi, dinamisasi, koordinasi, dan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima aspek peran pemerintah desa telah dilaksanakan, tetapi belum optimal. Pada aspek regulasi, sosialisasi dan imbauan telah dilakukan, namun belum tersedia aturan khusus mengenai sampah kiriman. Pada aspek fasilitasi, sarana pengelolaan sampah telah disediakan, tetapi fasilitas dan alat berat masih terbatas. Pada aspek dinamisasi, masyarakat telah digerakkan melalui kerja bakti dan gotong royong, meskipun partisipasi lintas wilayah belum optimal. Koordinasi dan pengawasan juga telah dilakukan, tetapi belum terintegrasi secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Penelitian ini menyimpulkan bahwa

penanganan sampah masih cenderung bersifat reaktif setelah terjadi penumpukan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, koordinasi lintas wilayah, serta pengawasan berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih efektif.

Kata kunci: Pemerintah Desa; Sampah Kiriman; Irigasi Karanggelam; Pengelolaan Sampah; Dawuan Tengah.

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah merupakan isu lingkungan yang terus berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Saluran irigasi menjadi salah satu lokasi yang tercemar sampah, terutama sampah rumah tangga dan plastik. Sampah yang masuk ke saluran air dapat menurunkan kualitas lingkungan, menyumbat aliran, serta mengganggu fungsi irigasi bagi pertanian dan kebutuhan masyarakat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi berkontribusi terhadap peningkatan volume, jenis, dan karakteristik sampah.

Permasalahan tersebut terlihat di Kabupaten Karawang, khususnya Kecamatan Cikampek. Pemberitaan mengenai Irigasi Karanggelam menyebutkan bahwa hujan deras membawa sampah kiriman dari sejumlah wilayah, antara lain Cikampek Timur, Cikampek Selatan, Kamojing, Pusaka, serta wilayah Purwakarta seperti Cikopo dan Cinangka. Sampah yang terbawa aliran air kemudian tertahan dan menumpuk di saluran irigasi. Pada peristiwa Februari 2025, tumpukan sampah di gorong-gorong Irigasi Karanggelam menghambat aliran air dan menimbulkan persoalan kebersihan lingkungan.

Data pengelolaan sampah Kecamatan Cikampek yang dikutip dalam penelitian menunjukkan bahwa volume sampah tercatat sebesar 21.402 ton pada 2021, dengan 14.728 ton tertangani dan empat armada pengangkut. Pada 2022, volume tercatat sebesar 17.737 ton, sedangkan sampah tertangani sebesar 11.299 ton dan armada pengangkut berjumlah dua unit (Salsabila et al., 2024). Data tersebut memberi konteks mengenai tantangan pengelolaan sampah, sementara persoalan sampah kiriman di Karanggelam memiliki karakter khusus karena sampah berasal dari aliran lintas wilayah dan berkumpul pada titik gorong-gorong.

Penanganan persoalan ini melibatkan banyak pihak dengan kewenangan berbeda. Pemerintah desa berhubungan langsung dengan masyarakat dan dapat menyampaikan laporan serta mengoordinasikan penanganan. DLHK berkaitan dengan pengelolaan dan pengangkutan sampah, sedangkan PUPR dapat terlibat dalam penanganan teknis sesuai kewenangan dan ketersediaan sarana. Karena sumber sampah tidak terbatas pada satu desa, penyelesaian masalah tidak cukup mengandalkan pembersihan setelah penumpukan terjadi, tetapi membutuhkan koordinasi lintas wilayah, dukungan fasilitas, partisipasi masyarakat, dan pengawasan berkelanjutan.

Penelitian terdahulu mengenai pengelolaan sampah desa membahas peran pemerintah dan masyarakat, kebijakan desa, serta keterbatasan fasilitas dan partisipasi. Namun, kajian tentang sampah kiriman yang secara khusus menumpuk dan menghalangi gorong-gorong irigasi masih memerlukan perhatian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis peran stakeholder dalam mengatasi sampah kiriman di Irigasi Karanggelam, dengan memperhatikan lima dimensi peran pemerintah menurut Siagian (2016), yaitu regulator, fasilitator, dinamisator, koordinator, dan pengawas.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan peran stakeholder dalam menangani sampah kiriman di gorong-gorong Irigasi Karanggelam, Desa Dawuan Tengah, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen, peraturan, pemberitaan, serta literatur yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi kondisi irigasi dan lingkungan sekitar, wawancara terstruktur maupun semi-terstruktur, serta dokumentasi.

Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam permasalahan, meliputi Sekretaris Desa Dawuan Tengah, pihak DLHK, pihak PUPR, Ketua RT, dan masyarakat yang terdampak. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis temuan disusun berdasarkan lima dimensi peran menurut Siagian (2016): regulator, fasilitator, dinamisator, koordinator, dan pengawas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran sebagai regulator

Peran regulator berkaitan dengan penetapan aturan, kebijakan, dan pedoman bagi masyarakat maupun pihak terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Dawuan Tengah telah memiliki Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2023 sebagai dasar umum pengelolaan sampah. Pemerintah desa juga menyampaikan sosialisasi, imbauan, dan teguran kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Meskipun demikian, belum terdapat ketentuan atau prosedur operasional khusus yang mengatur penanganan sampah kiriman yang terbawa dari wilayah lain dan tertahan di Irigasi Karanggelam.

Kondisi ini menunjukkan bahwa dasar pengaturan umum telah tersedia, tetapi belum sepenuhnya menjawab sifat masalah yang lintas wilayah. Belum adanya prosedur khusus mengenai pelaporan, pembagian tugas, waktu respons, serta koordinasi antardaerah membuat penanganan cenderung dilakukan ketika sampah sudah menumpuk atau aliran mulai terganggu. Dengan demikian, peran regulator telah dijalankan, tetapi belum optimal untuk membangun mekanisme pencegahan yang konsisten.

Peran sebagai fasilitator

Dalam aspek fasilitasi, pemerintah desa telah menyediakan fasilitas kebersihan dasar, antara lain tempat sampah, gerobak sampah, kendaraan pengangkut, dan mesin pencacah plastik. Penanganan pada titik irigasi juga membutuhkan dukungan alat berat serta armada untuk mengangkut sampah setelah diangkat dari saluran. Pemerintah desa berkoordinasi dan mengajukan dukungan kepada instansi terkait, termasuk PUPR dan DLHK, sesuai tugas masing-masing.

Namun, ketersediaan fasilitas dan alat berat masih terbatas. Penanganan juga dipengaruhi akses menuju lokasi, kapasitas armada, jadwal pengangkutan, dan kebutuhan penanganan di lokasi lain. Karena sampah dapat kembali datang setelah pembersihan, fasilitas yang ada belum cukup untuk memastikan solusi berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa peran fasilitator telah berjalan, tetapi perlu dukungan sarana dan prasarana serta perencanaan pencegahan, termasuk kemungkinan fasilitas penahan sampah yang dipelihara secara rutin.

Peran sebagai dinamisator

Peran dinamisator terlihat dari upaya pemerintah desa menggerakkan masyarakat melalui kerja bakti, gotong royong, sosialisasi, penyampaian informasi, rapat Minggon, media sosial,

dan grup WhatsApp. RT dan masyarakat juga berperan melaporkan kondisi irigasi ketika sampah mulai menumpuk atau aliran air terganggu. Kegiatan tersebut menunjukkan adanya saluran komunikasi dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Meskipun demikian, partisipasi masyarakat cenderung berpusat pada lingkungan tempat tinggal masing-masing. Sementara itu, sampah yang sampai di Karanggelam terbawa dari sejumlah wilayah lain sehingga upaya warga setempat tidak dapat menghentikan sumber sampah secara keseluruhan. Artinya, mobilisasi masyarakat telah dilakukan, tetapi belum optimal untuk mendorong tindakan kolektif lintas wilayah. Penguatan kesadaran dan partisipasi perlu mencakup pencegahan pembuangan sampah ke aliran air, pelaporan dini, dan kerja sama dengan wilayah yang menjadi sumber sampah.

Peran sebagai koordinator

Koordinasi berlangsung antara pemerintah desa, RT/RW, masyarakat, DLHK, PUPR, dan unsur pemerintah terkait. Rapat Minggon menjadi salah satu ruang untuk menyampaikan informasi dan membahas persoalan lingkungan, sedangkan komunikasi langsung dan grup WhatsApp digunakan untuk melaporkan kondisi di lapangan. Ketika sampah menumpuk, laporan masyarakat atau RT diteruskan kepada pemerintah desa untuk ditindaklanjuti melalui pengecekan dan koordinasi dengan instansi yang berwenang.

Pelaksanaan koordinasi masih menghadapi keterbatasan alat, anggaran, armada pengangkut, dan tenaga teknis. Penanganan juga bergantung pada prioritas dan ketersediaan sumber daya masing-masing instansi. Selain itu, keterlibatan wilayah yang menjadi sumber sampah belum optimal. Oleh sebab itu, koordinasi yang sudah berjalan masih cenderung reaktif dan belum sepenuhnya membentuk sistem lintas wilayah yang terencana, dengan pembagian tanggung jawab dan jadwal penanganan dari hulu hingga hilir.

Peran sebagai pengawas

Pengawasan dilakukan melalui pemantauan kondisi Irigasi Karanggelam, laporan dari masyarakat dan RT, pengecekan teknis oleh pihak terkait, imbauan kepada masyarakat, serta evaluasi melalui rapat. Pemantauan terutama menjadi penting pada saat atau setelah hujan karena aliran air dapat membawa sampah baru. RT dan warga turut melakukan pengawasan langsung dan menyampaikan laporan ketika melihat penumpukan atau hambatan aliran.

Walaupun mekanisme tersebut berjalan, pengawasan masih banyak bergantung pada laporan masyarakat dan respons setelah sampah menumpuk. Belum terdapat sistem pengawasan terpadu dari hulu hingga hilir yang secara rutin memetakan titik rawan, mendokumentasikan kondisi saluran, serta menghubungkan laporan dengan tindak lanjut lintas wilayah. Karena itu, pengawasan belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pencegahan. Pemantauan rutin, mekanisme pelaporan yang jelas, dan koordinasi dengan wilayah sumber sampah menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan fungsi irigasi.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa stakeholder telah menjalankan peran regulator, fasilitator, dinamisator, koordinator, dan pengawas dalam mengatasi sampah kiriman di Irigasi Karanggelam, tetapi pelaksanaannya belum optimal. Hambatan utamanya terletak pada belum adanya mekanisme khusus untuk sampah kiriman lintas wilayah, keterbatasan fasilitas dan sumber daya, partisipasi yang belum menjangkau wilayah asal sampah, koordinasi yang masih situasional, serta pengawasan yang belum terintegrasi dari hulu hingga hilir. Temuan ini menegaskan bahwa persoalan sampah kiriman perlu dipahami sebagai

masalah tata kelola bersama, karena lokasi penumpukan dan sumber sampah berada pada wilayah yang dapat berbeda. Efektivitas penanganan berkaitan dengan kemampuan stakeholder menyelaraskan kewenangan, informasi, dan tindakan pencegahan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Baidlowi, A., & Ubaidillah, L. (2024). Kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan sampah di Desa Langkap Kabupaten Jember. Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu, 8(7).

Biddle, B. J. (1986). Recent developments in role theory. Annual Review of Sociology, 12, 67–92. https://doi.org/10.1146/annurev.so.12.080186.000435

Irigasi Karanggelam Cikampek dipadati sampah kiriman. (n.d.). RCTI+. https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/4697719/irigasi-karanggelam-cikampek-dipadati-sampah-kiriman

Muchsin, T., & Saliro, S. S. (2020). Peran pemerintah desa dalam pengelolaan sampah perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Jurnal Justisia, 5.

Napsiyah, S., Bangsawan, M. F., Rahmatillah, I., Apriani, F. R., & Rahmania, R. A. (2025). Peran Pemerintah Desa Pulosari dalam pengelolaan sampah di pinggir Situ Cileunca. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora. http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

Prasojo, R. A., & Fauziah, L. (n.d.). Peran pemerintah-masyarakat dalam pembangunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Salsabila, F., Ridwan, T., & H, H. (2024). Analisa volume penyebaran sampah di Karawang menggunakan algoritma K-Means Clustering. Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan, 12(2). https://doi.org/10.23960/jitet.v12i2.4226

Siagian, S. P. (2016). Administrasi pembangunan: Konsep, dimensi dan strateginya. Universitas Terbuka.

Suryani, E., & Mawardi. (n.d.). Peran kepala desa dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Desa Lumbang Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong. Jurnal Administrasi Publik & Administrasi Bisnis, 8. https://doi.org/10.35722/japb